

Pengaturan Penyampingan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

M. Herja, Paham Triyoso S.H M. Hum., Alfons Zakaria, S.H LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: mherja@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis terkait penyampingan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi hukum, yaitu: *Content Analysis*, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan penyampingan perkara sesuai asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masih tergolong sempit hanya bisa dilaksanakan oleh Jaksa Agung selaku pimpinan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menyampingan perkara pidana, dan penutupan perkara dapat dilaksanakan oleh semua Jaksa selaku penuntut umum(JPU) tanpa adanya proses demi kepentingan umum tetapi hanya bisa dilaksanakan penutupan perkara demi kepentingan hukum terkait permasalahan yang menyangkat masyarakat yang bersangkutan didalam perkara pidana.

Kata Kunci: Penyampingan Perkara Pidana, Asas oportunitas dan Sistem Peradilan Pidana

Arrangements Overdrive Criminal Case In The Criminal Justice System In Indonesia

M. Herja, Paham Triyoso S.H M. Hum., Alfons Zakaria, S.H LLM.

Faculty of Law, University of Brawijaya

Email: mherja@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine and analyze related overdrive criminal cases in the criminal justice system in Indonesia in Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia to the closing of the criminal case in the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code). This study uses a normative approach to law (Statute Approach). Primary legal materials, secondary, and tertiary authors obtained will be analyzed using the techniques of statutory interpretation analysis, namely: Content Analysis, which is used as a reference in resolving legal issues that become the object of study. From the results of research with the above method, the authors obtained answers to existing problems that the implementation of the principle of opportunity overdrive appropriate case in point c of Article 35 of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia is still relatively narrow only be carried out by the Attorney General as the leadership of Chief Prosecutor general of Indonesia in the criminal case aside, and closing the case may be carried out by all prosecutors in the absence of the public interest but could only dilaksanakan closing the case in the interests of law-related problems that menyangkat communities concerned in criminal cases.

Keywords: Criminal Overdrive, Principle of Opportunity and the Criminal Justice System

A. Pendahuluan

Hukum sebagai perlindungan dalam kepentingan manusia, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui pelaksanaan dalam penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu¹: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.²

Dari beberapa komponen tersebut diatas, suatu permasalahan yang ada dimasyarakat dapat terselesaikan melalui salah satu proses hukum yaitu penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa di Lembaga Kejaksaan, selaku Penuntut Umum (PU) menurut Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai Pasal 1 ayat 6 huruf a dan b yang menyatakan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hukum.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Pada umumnya negara-negara modern dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sistem hukum yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental mungkin negara-negara sosialis ke dalam kelompok tersendiri. Kedua kelompok negara-negara tersebut pernah menjajah sebagian besar negara Asia dan Afrika, dan dengan sendirinya sistemnya diperkenalkan pada wilayah jajahannya itu. Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi terpisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah yaitu Belanda dan Inggris. Karena dalam sistem Anglo Saxon tidak dikenal sistem oportunitas dan legalitas secara resmi, maka kebijakan penuntutan ini bervariasi dari suatu negara ke negara lain. Inggris sendiri mempraktekkan penyampingan perkara demi kepentingan umum diartikan luas, termasuk kepentingan anak dibawah umur dan orang yang sudah terlalu tua. Berlainan sekali dengan Indonesia,

¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum-Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 71

² Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 3

secara historis dan yuridis menganut asas oportunitas dan lebih mengartikannya terlalu sempit yaitu kepentingan negara atau masyarakat.³

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 35 huruf c bahwa:

“Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup perkara demi kepentingan hukum”. Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas menentukan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah perbuatan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum. Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan pula perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu berupa penghentian penuntutan, sedang dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan pula wewenang lain, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Perkara yang dihentikan penuntutannya demi kepentingan hukum adalah perkara yang dihentikan penuntutannya dikarenakan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (Pasal 40 ayat (2) huruf a KUHAP).

Pada era reformasi, visi dan misi Presiden adalah memberantas korupsi. Kepentingan umum menghendaki agar korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya.⁴ Dapat diambil contoh mengenai penggunaan asas oportunitas dalam penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang ada di Indonesia, yaitu⁵: kasus Bibit-Chandra. Terkait kasus Bibit-Chandra, Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kejaksaan dianggap lemah mengakibatkan praperadilan yang diajukan Anggodo dimenangkannya dengan putusan diteruskan kasus tersebut ke pengadilan. Dengan demikian perlu adanya pedoman bagi jaksa untuk dapat melakukan penyampingan perkara pidana sebagai jaminan dalam kerangka kebijakan penuntutan yang transparan dalam kemandirian terhadap penggunaan asas oportunitas yang meliputi juga pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan asas oportunitas, sumber daya penegak hukum, serta hubungan terkait dalam sistem.

Oleh karena penyampingan perkara merupakan wewenang, bukan mustahil keputusan penyampingan perkara dapat digugat ke pengadilan, untuk mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mendeponer perkara itu, Jaksa Agung

³ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 30-31

⁴ O.C. Kaligis, **Deponeering Teori Dan Praktik**, P.T. Alumni, Bandung, 2011, hlm 4-5.

⁵ Kompas. **Indonesian Corruption Watch**. 12 Juni, 2010.

memiliki alasan yang cukup yakni: Sejauh mana penyimpangan perkara itu memenuhi syarat demi kepentingan umum, yakni kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat umum dan ukuran penggunaan asas oportunitas yang ideal dan yang mampu memberikan gambaran tentang kebijakan penuntutan dalam penanganan perkara pidana secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab yang dilakukan tanpa meninggalkan rasa keadilan. Dari latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih mendalam mengenai pengaturan asas oportunitas oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Pengaturan Penyimpangan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.**

B. Masalah/Isu Hukum

Adapun permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan asas oportunitas dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan penutupan perkara pidana dalam Pasal 14 Huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
3. Bagaimana kriteria kepentingan umum dalam asas oportunitas?

C. Pembahasan

A. Pengaturan Asas Oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penjelasan umum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, disamping itu Undang-undang berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis. Jelas bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan saja melainkan juga hukum tidak tertulis yang meliputi hukum adat istiadat dan hukum kebiasaan-kebiasaan baik yang timbul dalam penyelenggaraan Negara maupun kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan dihayati oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara pidana dapat menyelesaikan tindak pidana tersebut dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan berada ditangan Lembaga Kepolisian. Sedangkan penuntutan berada di tangan Lembaga Kejaksaan. Pemisa Lembaga Kepolisian sebagai lembaga penyidik dan Lembaga Kejaksaan sebagai penuntut umum adalah mencerminkan adanya sistem pengawasan dengan alasan demi kepentingan hak-hak tersangka/terdakwa.⁶

Dalam proses penuntutan Lembaga Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung

⁶ Ahmad M. Ramli, **Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2008, hlm 8

memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara, demikian penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah itu.⁷

Pengaturan mengenai asas oportunitas sesuai dengan perundang-undangan terkait Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur sebagai salah satu proses penyampingan perkara demi kepentingan umum antara lain menurut:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Maksud dan tujuan undang-undang memberikan kewenangan pada Jaksa Agung tersebut, adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalagunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas. Sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negara di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak pada setiap jaksa selaku penuntut umum (JPU) dan alasannya mengingat keadaan dan kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi.⁸

Pengaturan asas oportunitas menjadi kepentingan didalam sistem peradilan pidana khususnya di Indonesia agar aturan-aturan asas oportunitas yang sesuai dengan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak menjadi aturan yang disalahgunakan oleh instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada didalam sistem peradilan pidana tanpa terkecuali Lembaga Kejaksaan yang menjadi tugas dan kewenangan dalam melaksanakan asas oportunitas.

Menjadi suatu cita-cita, apabila masyarakat dapat memperkembangkan hukum pada suatu sisi, sedangkan pada sisi lainnya seyogyanya hukum juga memperkembangkan masyarakat. Apabila masyarakat memperkembangkan hukum, berarti hukum memperoleh pengaruh baik kehadiran dan arahnya namun hal tersebut lebih bersifat pasif dan kadar perubahan relatif tidak cukup kuat bagi upaya memperkembangkan lagi, masyarakat. Sedangkan sebaliknya apabila hukum memperkembangkan masyarakat, maka hukum mampu secara aktif mempengaruhi serta memberikan dasar fasafah (falsafah) dan arah perubahan masyarakat. Kemutlakan hukum akan membahayakan kehidupan masyarakat dan kebekuan hukum yang melekatinya akan mematikan kreasi kehidupan. Oleh karena itu, hukum memerlukan upaya-upaya pembaharuan dan memperkembangkan hukum, agar tumbuh menyerap aspirasi masyarakat dengan tetap memelihara hakikat hukum secara universal.⁹

⁷ Yelina Rachma P, **Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010, hlm 6

⁸ Djoko Prakoso, **Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 40

⁹ *Ibid.*, hlm 94

Asas oportunitas sesungguhnya merupakan pranata hukum yang universal, tetapi penerapan asas ini dengan pemahaman dan situasi yang sudah berubah jelas sekali tidak melahirkan kemanfaatan, dan oleh karena itu mewajibkan kita untuk membahas dan membuka penafsiran baru yang lebih sesuai dengan kepentingan zaman. Makna harfiah tentang oportunitas adalah ketepatan, kepantasan, menguntungkan, saat yang tepat, layak, kesempatan dan manfaat yang baik. Jelas sekali bahwa asas ini tiada lain adalah bertujuan untuk memberikan kemanfaatan, kelayakan dan kesempatan yang baik, guna kepentingan masyarakat, sebagaimana dimaksud dengan kosa kata oportunitas itu sendiri. Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan/tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seorang, walaupun cukup bukti untuk dituntut atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Jadi asas oportunitas lebih merupakan suatu kebijaksanaan yang memberi wewenang kepada Jaksa Agung guna memotong salah satu mata rantai proses peradilan, karena mata rantai proses peradilan itu tiada lain adalah penyidikan-penuntutan-pemeriksaan dimuka pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).¹⁰

Pada saat ini asas oportunitas masih dihormati dan diakui hanyalah mengenai kebijaksanaan yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum (PU) untuk meniadakan salah satu mata rantai dari rangkaian proses peradilan yakni wewenang untuk tidak menuntut, maka timbul pertanyaan apakah kebiasaan ini sudah cukup tetap/tepat apabila dihubungkan dengan pengertian proses peradilan secara keseluruhan. Kewenangan untuk tidak menuntut atas pertimbangan kepentingan umum, disebabkan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaat bagi kemaslahatan masyarakat maka adalah layak apabila dipertimbangkan memperlakukan kewenangan ini pada salah satu mata rantai lainnya sepanjang penerapan hukum kebiasaan ini juga memberikan ke maslahatan umum, katalah mata rantai eksekusi. Penerapan asas oportunitas secara khusus pada mata rantai eksekusi berupa penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan dianggap wajar, layak dan pantas karena perintah pelaksanaan hukuman apabila bagi terdakwa yang masih berada diluar tahanan tidak memberikan batas waktu yang bersifat imperatif dan lagi pula penangguhan ini bukan berarti/ bermaksud mengubah putusan pengadilan atau meniadakan hukuman serta pula menghentikan pelaksanaan hukuman. Penerapan asas ini tetap memiliki sifat “kasuistik”.¹¹

Sampai dengan sebelum lahirnya kasus penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atas terdakwa Hariman Siregar dan Sjahrir, maka penggunaan asas oportunitas dalam proses peradilan masih terbatas hanya pada suatu mata rantai, yakni membenarkan kebijaksanaan Penuntut Umum (PU) untuk meniadakan penuntutan demi kepentingan umum. Tetapi terlalu cepat dicatat, beberapa waktu sebelum kasus penangguhan pelaksanaan putusan pengadilan atas diri terdakwa Hariman Siregar dan Sjahrir, ternyata Mahkamah Agung sebagai pengawas dan pengamat tertinggi peradilan di Indonesia telah memperkenankan kedua terdakwa yang justru tersangkut dalam perkara subversi berada diluar tahanan, sambil menunggu putusan atas permohonan kasasi mereka berdasarkan kemanusiaan. Padahal Undang-Undang Tindak Pidana Subversi tidak memungkinkan seorang tersangka apabila terdakwa berada diluar tahanan, karena apa jadinya apabila seseorang merusak sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan dengan kegiatan subversinya justru berada diluar tahanan/ditengah masyarakat. Dari tindakan ini jelas sekali bahwa Mahkamah

¹⁰ *Ibid.*, hlm 96

¹¹ *Ibid.*, hlm 98

Agung(MA) telah merintis secara nyata upaya memfungsikan nilai-nilai Pancasila dibidang hukum sebagaimana yang dicita-citakan. Ini merupakan pertanda pembinaan dan pemikiran hukum kita sudah harus mampu menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan peradilan untuk disesuaikan dengan cita dasar kita yang terkandung dalam pandangan hidup. Kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral sebagai pancaran Pancasila secara seimbang dan serasi.¹²

Wewenangan penuntutan dan meniadakan penuntutan sebagai salah satu mata rantai proses peradilan merupakan kebijaksanaan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum (PU) tertinggi. Untuk menerapkan asas oportunitas pada mata rantai eksekusi, disamping harus dilandasi pada kemudahan-kemudahan hukum yang tersedia masih memerlukan suatu pertimbangan secermat mungkin, karena perwujudannya sebagai kebijaksanaan harus memberi dampak yang positif dalam upaya mewujudkan cita hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan memahami kedudukan dan kaitan *integral* antara mata rantai proses peradilan, maka kebijaksanaan untuk meniadakan penuntutan berdasarkan asas oportunitas, dianggap cukup beralasan untuk memperlakukan juga pada mata rantai eksekusi, karena kebebasan wewenangan Penuntutan (*prosecutorial discretion*) dan kebebasan kewenangan eksekusi (*eksecutorial discretion*) kedua-duanya dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut teori ilmu hukum, maupun penuntutan kelayakan, yang wajar dan patut berdasarkan kemanusiaan dan keadilan yang diterapkan secara selektif serta kasuistis. Tindakan Jaksa Agung tersebut sebenarnya merupakan tindakan diskresi dibidang penuntutan dan eksekusi. Yang perlu dijaga adalah agar diskresi tersebut tidak berubah menjadi *detournement du pouvoir* atau penyalagunaan wewenang. Dalam hubungan ini maka pernyataan Lord halsbury dalam bukunya A.F. Wilcox tersebut dapat dijadikan pedoman, yakni bahwa penangguhan wewenang diskresi tersebut dilakukan *within the rules of reason and justice*.¹³

Proses perkara pidana dapat terselesaikan dengan aturan yang sesuai dengan pengaturan didalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan khususnya dalam hal penuntutan yang menjadi tugas pokok dari Lembaga Kejaksaan dan melakukan penghentian penuntutan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan penyimpangan perkara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggunakan asas oportunitas yang dipergunakan kewenangan tersebut oleh Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan.

B. Pengaturan Penutupan Perkara Pidana dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Dalam Hukum Acara Pidana (HAP) dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut jaksa selaku penuntut umum.

Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa:

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dipertegas oleh Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHP tersebut juga menyebutkan bahwa:

¹² *Ibid.*, hlm 99

¹³ *Ibid.*, hlm 102

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum”.

Hasil penyidikan yang jelas sudah dinyatakan oleh jaksa selaku penuntut umum sudah lengkap, telah memenuhi unsur-unsur yang akan didakwakan dan bisa langsung dilimpahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya terkandung hasil penyidikan sudah maksimum dan jaksa penuntut umum telah mengirimkan petunjuk-petunjuk pada penyidik untuk melengkapinya akan tetapi tidak ditemukan unsur-unsurnya. Bilamana dari hasil penyidikan berkas perkara dalam pasal 139 KUHAP dan pasal 140 ayat 1 KUHAP, jaksa penuntut umum berpendapat tidak cukup unsur (bukti) atau kadaluarsa maka penuntut umum menghentikan penuntutan dan menuangkan dalam surat penetapan. Berdasarkan ketentuan kedua tersebut disimpulkan bahwa hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum bukan selamanya mengandung arti bahwa perkara harus dimajukan atau dilimpahkan ke persidangan, tetapi sekalipun dinyatakan hasil penyidikan sudah lengkap ada kemungkinan perkara dihentikan penuntutannya karena tidak memenuhi unsur atau kadaluarsa atau meninggal dunia, dan lain sebagainya.¹⁴

Perkara dihentikan demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam penghentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama dihentikan penuntutannya, demi kepentingan hukum. Perkara dihentikan penuntutannya “demi kepentingan hukum” mengandung arti agar kepastian hukum wibawa hukum terjamin. Perkara yang sejak awal sudah diketahui oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti atau perkara bukan merupakan tindak pidana dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sudah dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan hakim adalah putusan bebas murni. Putusan bebas murni sudah tentu menyangkut kepentingan hukum, oleh karena itu untuk apa dimajukan ke persidangan kalau sejak awal sudah dapat diperkirakan bahwa putusan bebas. Untuk menjaga kemurnian hukum itu agar jaksa penuntut umum dan penyidik tidak sewenang-wenang melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, maka kepada pihak ketiga yang berkepentingan diberi hak untuk mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tujuannya adalah bahwa tindakan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan benar dan demi kepentingan hukum belaka.¹⁵

Aturan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP. Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP).

Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). ditentukan selanjutnya bahwa turunan

¹⁴Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 105

¹⁵*Ibid.*, hlm. 105-106

ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan, negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.¹⁶

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “perkara ditutup demi hukum” dalam hal lain bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHAP). Dari ketentuan tersebut bahwa ketetapan penuntut umum untuk mengesampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas), tidak berlaku asas *ne bis in idem*.¹⁷

Menurut proses peradilan pidana, tahapan setelah penyidikan yaitu tahapan penuntutan, yang dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidik dari penyidik. Apabila diperlukan untuk proses penyidikan penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.¹⁸

Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Sebagai tindak lanjut pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, penuntut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum dan mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim.¹⁹

Perkara ditutup demi hukum (pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Menutup perkara demi hukum atau demi kepentingan hukum itu adalah perbuatan tidak melanjutkan suatu perkara pidana ke pengadilan oleh penuntut umum, misalnya karena adanya dasar-dasar yang meniadakan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun dalam bentuk ketidak sengajaaan (*culpa*), karena tidak adanya unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), karena tidak dapat dipertanggung jawabkannya tersangka atas perbuatannya (*ontoereken ingsvatbaarheid*), ataupun karena tidak dapat

¹⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 158

¹⁷ *Ibid.*, hlm 158

¹⁸ Marlina, *Op.Cit*, hlm. 103

¹⁹ *Ibid.*,

dipertanggung jawabkan perbuatan yang bersangkutan kepada tersangka (*ontoerekenbaarheid*).²⁰

C. Perbedaan pengaturan asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan penutupan perkara demi kepentingan hukum dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Prinsip asas oportunitas mula-mula masuk di Indonesia sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kemudian ditentukan peraturan peundang-undangnya agar asas oportunitas perkara dapat dikembangkan sebagaimana disesuaikan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang pokok-pokok Kejaksaan dan selanjutnya didalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²¹

Perkara dihentikan penuntutannya “demi kepentingan hukum” ini mengandung arti agar kepastian hukum (*recht zekerheid*) dan wibawa hukum terjamin. Bilamana perkara yang dari semula telah diketahui oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti, atau perkara bukan merupakan tindak pidana dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan sudah dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan hakim, adalah putusan bebas murni.²²

Adapun pengaturan yang dimuat dalam buku I KUHP, jadi diatur dalam hukum materiil, bukan dalam hukum acara atau hukum formal, yaitu:

1. Pasal 75 KUHP

Barang siapa yang memasukan pengaduan tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduan itu dalam 3 bulan sejak hari dimasukkannya (pasal 367,376,284 KUHP, dsb).

2. Pasal 76 KUHP

Kecuali dalam putusan hakim masih dapat diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputus oleh Hakim Negara Indonesia, dengan putusan yang tidak dapat diubah lagi (*nebis in idem*).

3. Pasal 77 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur lantaran tertuduh (tersangka) meninggal dunia

4. Pasal 78 KUHP

Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya dan seterusnya.

Khusus mengenai kewenangan penyampingan perkara tersebut telah ada suatu pegangan yang berdasarkan instruksi Jaksa Agung tanggal 7 Juni 1962, Nomor: 7/Inst/HK/1962, antara lain disebutkan: Bahwa perkara-perkara yang dapat dikesampingkan oleh Jaksa Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang telah memegang perkara-perkara yang bersangkutan ialah perkara:

- a. Yang telah lewat waktu/daluwarsa;
- b. Yang dicabut pengaduannya;
- c. Yang mana tertuduh meninggal dunia;
- d. Yang tidak ada alasan untuk menuntut terdakwa.

²⁰ Hari Sasangka, **Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Darma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hlm. 30-31

²¹ Sartika Dwi Kusuma Wardhani, **Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban**, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan) Universitas Brawijaya, 2012, hlm 10

²² Osman Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm 87

Tetapi dengan konsekuensi dalam hal perkara-perkara:

- a. Yang dalam peraturan-peraturan lain diatur tersendiri (misalnya perkara korupsi).
- b. Yang menarik perhatian umum.
- c. Yang diterima dari Kejaksaan Agung.

Berlaku suatu ketentuan dimana penyimpangan perkara-perkara dari a, b, dan c diatas harus seizin dari Jaksa Agung, sedangkan penyimpangan perkara berdasarkan asas oportunitas tetap.

Asas oportunitas merupakan tugas dan kewenangan dari Jaksa Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Pasal 32 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam Pasal 35 huruf c dan Pasal 32 huruf c yang isi pasal tersebut sama disebutkan sebagai berikut: "Mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum".

D. Kriteria kepentingan umum dalam asas oportunitas sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan perbuatan pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum asas oportunitas diakui dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia: "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum". Keberadaan asas oportunitas dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: "Yang dimaksud penghentian penuntutan tidak termasuk penyimpangan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung".

Aturan asas oportunitas dalam hukum acara pidana dikenal adanya suatu badan khusus yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan ke pengadilan yang disebut penuntut umum hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"

- b. Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

- c. Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebelum ketentuan itu, dalam praktik telah dianut asas itu. Dalam hal ini *lemaire* mengatakan bahwa pada dewasa ini asas oportunitas lazim dianggap sebagai suatu

asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku. (Lemaire dikutip Andi Hamzah, 2008:17) Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam penodeponeran perkara itu, pedoman pelaksanaan KUHAP memberikan penjelasan sebagai berikut:²³

“.....Dengan demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat”.

Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara.

- a) Adapun yang di maksud dengan kepentingan umum tidak ada batasan pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu permasalahannya harus kita kembalikan kepada tujuan hukum atau cita-cita hukum yakni yang diwujudkan pokok-pokok pikiran pembukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Secara garis besar kepentingan umum yang dimaksud dalam pokok-pokok pikiran itu adalah kepentingan negara dan masyarakat.
 - a. Kepentingan negara tercermin dalam pelaksaam tugas dan wewenang lembaga negara khususnya bagi penyelenggara wewenang dan tugas pemerintah.
 - b. Sedangkan kepentingan masyarakat tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya jika dilihat dari pendapat Supomo yang mengatakan bahwa: “Baik di negeri Belanda maupun di “Hindia Belanda” berlaku yang disebut asas “oportunitas” dalam tuntutan pidana, itu artinya Badan Penuntut Umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunitas”, tidak guna kepentingan masyarakat.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, dengan berlakunya UUD 1945 maka Jaksa Agung mempertanggung jawabkan pelaksanaan wewenang oportunitas kepada presiden, yang pada gilirannya presiden mempertanggung jawabkan pula kepada rakyat. Di bawah ini dapat dibandingkan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dalam hubungannya dengan pelaksanaan asas oportunitas yaitu:

- a. Apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian bagi negara dan tidak terhadap kepentingan masyarakat, sedangkan kerugian dari akibat tersebut dirasakan tidak mempengaruhi jalanya pemerintahannya, maka dapat perkara itu dikesampingkan.
- b. Apabila tindak tindak pidana tersebut tidak merugikan bagi kepentingan penyelenggara negara namun berakibat terganggunya kehidupan masyarakat atau timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat, maka perkara tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Pengertian demi kepentingan umum, dalam undang-undang, penjelasan maupun dalam peraturan lain tidak dijelaskan apa yang disebut dengan pengertian kepentingan

²³ Yelina Rachma P, **Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)**, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm 43

umum. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat 2 alasan penyampingan perkara, yaitu:

1. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas karena alasan demi kepentingan umum (Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)
2. Penyampingan perkara karena alasan demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h KUHP)

Terkait dengan proses penyampingan perkara yang ditutup demi hukum tidak sama dengan perkara yang di tutup demi kepentingan umum, karena ²⁴:

- a. “Demi hukum” tidak sama pengertiannya dengan “demi kepentingan umum” sebab hukum juga mengatur kepentingan individual selain dari kepentingan umum.
- b. Ternyata perkara yang di tutup “demi hukum” tidak dideponer secara definitif tetapi masih dapat dituntut bilamana ada alasan baru, sedangkan perkara yang ditutup definitif demi kepentingan umum tidak boleh dituntut kembali dan lagi pula perkara demikian cukup alat bukti.

Kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas diberikan wewenangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk menyampingan. Dalam prakteknya, bilamana suatu perkara dari suatu KEJARI hendak dikesampingkan, maka permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selalu disertai dengan saran dari Muspida tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah, dengan penjelasan kemungkinan adanya akibat negatif dalam masyarakat bilamana perkara dimajukan disidang. Berdasarkan saran-saran tersebut, Kajari mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, menyampingan perkara tersebut. Dari uraian diatas jelas, bahwa tindakan penyampingan perkara ini, harus benar-benar demi kepentingan umum.²⁵

Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepantingan umum. Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen terdapat 3 (tiga) alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan²⁶:

1. Demi Kepentingan Negara (*straatsbelang*):

Kepentingan negara tidak menghendaki suatu penuntutan jika terdapat kemungkinan bahwa aspek-aspek tertentu dari suatu perkara akan memperoleh tekanan yang tidak seimbang. Sehingga kecurigaan yang dapat timbul pada rakyat, dalam keadaan tersebut menyebabkan kerugian besar pada masyarakat.²⁷ Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. bagi bangsa Indonesia cita-cita hukum diwujudkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalm pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan umum mempunyai peranan pasif apabila

²⁴ Sartika Dwi Kusuma Wardhani, **Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban**, Malang, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, 2012, hlm 12.

²⁵ Osman Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm 90

²⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 156

²⁷ *Ibid.*, hlm. 156

dijadikan objek pengaturan daripada peraturan hukum, pelaksanaan asas oportunitas yang berlandaskan kepentingan umum harus dilihat dari dua segi perana kepentingan umum baik aktif maupun pasif. Kepentingan umum yang diatur dalam suatu peraturan hukum apabila dilanggar tidak dapat dijadikan sebagai landasan oportunitas untuk menyampingkan perkara pidana. Sebab justru kepentingan umum menuntut agar diadakan penuntutan dimuka hakim pidana untuk dijatuhkan pidana setimpal. Untuk itu, kepentingan umum yang dapat dipakai sebagai landasan untuk menyampingkan perkara pidana harus dikemukakan dalam aturan hukum lain yang mengatur tentang kepentingan umum yang harus dilindungi dan dipelihara.²⁸

2. Demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*)

Tidak dituntutnya perbuatan pidana karena secara sosial tidak dapat dipertanggung jawabkan. Termaksud dalam kategori ini tidak menuntut atas dasar pemikiran-pemikiran yang telah atau sedang berubah dalam masyarakat.²⁹ Kepentingan umum yang menjadi dasar didalam asas oportunitas sesuai pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kepentingan umum yang mengendalikan pada tugas alat negara untuk kelancaran mengurus rumah tangga negara, dan kepentingan masyarakat yang mengendalikan pada perlindungan serta ketentraman untuk bebas dari gangguan kejahatan bagi semua orang.³⁰ Agar dapat ditentukan apakah perkara pidana tersebut telah memenuhi syarat dalam proses penyampingan perkara dalam penyelesaian perkara pidana, dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan penyampingan perkara yang terkait dalam penyampingan perkara demi kepentingan umum yang dilakukan oleh Jaksa Agung selaku Jaksa Tertinggi di Lembaga Kejaksaan Agung sehingga perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan dasar bahwa perkara pidana tersebut telah dikesampingkan dan tidak dapat diproses.

3. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*)

Termasuk didalam kategori-kategori bila kepentingan pribadi menghendaki tidak dilakukannya penuntutan ialah dalam persoalan-persoalan hanya perkara kecil, dan atau yang jika yang melakukan tindak pidana telah membayar kerugian dan dalam keadaan ini masyarakat tidak mempunyai cukup kepentingan dengan penuntutan atau penghukuman.³¹ Penyampingan perkara yang dilakukan demi kepentingan pribadi dapat merugikan, bahwa ada kalanya sudah terang-berderang seseorang melakukan suatu kejahatan, akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang itu dituntut dimuka hakim pidana, kepentingan negara akan sangat dirugikan.³² Guna mencegah penyalagunaan kebijakan (*diskresi*) penuntutan maka wewenang tersebut ditiadakan pada tahun 1961, sejak itu hanya Jaksa Agunglah yang boleh menyampingkan perkara karena alasan kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, menurut Soenardi dalam bukunya yang berjudul

²⁸ Panji Wijanarko, **Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana**, Skripsi Program Ilmu Hukum (di terbitkan) , Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012, hlm 99-100

²⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 156

³⁰ Bambang Poernomo, **Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia**, Amarta Bukum, Yogyakarta, 1984, hlm 166.

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 156

³² (Mr. Wirjono Prodjodikoro) Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm 195-196

“Administration of criminal Justice in Indonesia With Special Reference to Invertigation” menyatakan, jaksa yang ingin menggunakan wewenang tersebut harus memohon pada jaksa agung untuk menyampingkan perkaranya, namun dalam prakteknya pada tahun 1961 Jaksa Agung Republik Indonesia sangat jarang menggunakan wewenang tersebut.³³

D. Penutup

A. Kesimpulan

Keseluruhan dari hasil pembahasan dan penelitian terdapat permasalahan dan pembahasan yang menjadi sorotan didalam penelitian, dapat diuraikan seperti:

1. Pengaturan asas oportunitas dalam Pasal 35 Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Dalam proses penuntutan Lembaga Kejaksaan dikenal adanya asas oportunitas yang menjadi tugas dan kewenangannya oleh Jaksa Agung sebagai proses tidak menuntut/mengesampingkan perkara pidana ke muka persidangan. Jaksa Agung memang diberi kewenangan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Paling tidak tercermin dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 35 huruf c berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dalam bagian penjelasan disebutkan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
2. Perkara dihentikan demi hukum adalah perkara yang dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam penghentian penuntutan ini ada dua persoalan, pertama dihentikan penuntutannya, demi kepentingan hukum. Perkara dihentikan penuntutannya “demi kepentingan hukum” mengandung arti agar kepastian hukum wibawa hukum terjamin. Perkara yang sejak awal sudah diketahui oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan berkas perkara tidak cukup bukti atau perkara bukan merupakan tindak pidana dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sudah dapat diperkirakan putusan yang akan dijatuhkan hakim adalah putusan bebas murni. Putusan bebas murni sudah tentu menyangkut kepentingan hukum, oleh karena itu untuk apa dimajukan ke persidangan kalau sejak awal sudah dapat diperkirakan bahwa putusan bebas. Proses penghentian penuntutan termaksud dalam wewenang jaksa selaku penuntut umum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 14 huruf h yang berbunyi: “Menutup Perkara Demi Kepentingan Hukum”.
3. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengartikan bahwa perkara tindak pidana tersebut dapat dikesampingkan oleh Lembaga Kejaksaan khususnya oleh Jaksa Agung yang telah menjadi kewenangan dan tugas pokok didalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terkait dalam proses penyampingan perkara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mendeskripsikan penutupan perkara yang ada di dalam aturan tersebut dengan melakukan penghentian penuntutan didalam penyampingan

³³ Surachmman, Andi Hamzah, **Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 38

perkara atau perkara ditutup demi kepentingan hukum sesuai pasal 14 huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4. Asas oportunitas dalam hukum positif tertulis telah mempunyai tempat yang pasti yaitu, didalam pasal 35 huruf c Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Karena kepentingan umum maka penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa agung dapat menyampingkan perkara. Kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas adalah hal yang tidak menuntut/alasan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan yakni mengesampingkan perkara demi kepentingan umum:
 1. Demi Kepentingan Negara (*staatsbelang*)
 2. Demi kepentingan masyarakat (*maatschapelijk belang*)
 3. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).

B. Saran

Demi terlaksananya penggunaan asas oportunitas didalam proses penyampingan perkara pidana oleh Lembaga Kejaksaan, sesuai Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Kejaksaan (khususnya Jaksa Agung).

Bagi Lembaga Kejaksaan khususnya Jaksa Agung selaku pimpinan didalam Lembaga Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum dibidang penuntutan, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pembaharuan tentang pengaturan asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar terciptanya penyelesaian perkara pidana dalam menggunakan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan dapat dijadikan sebagai petunjuk penerapan dalam pelaksanaan asas oportunitas yang sesuai dan tidak disalahgunakan kewenangan asas oportunitas tersebut dengan pedoman Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta peraturan hukum lain yang berlaku dimasyarakat.

2. Bagi Mahasiswa dan Akademisi, agar dapat memberikan ide-ide dan masukan dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait penggunaan asas oportunitas menurut Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengerti serta memahami dan sebagai informasi tentang asas oportunitas di dalam proses penyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung didalam Lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad M. Ramli, **Analisis dan Evaluasi Hukum Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta 2008.
- Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bambang Poernomo, **Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia**, Amarta Bukum, Yogyakarta, 1984.
- Djoko Prakoso, **Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hari Sasangka, **Penuntutan Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Darma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice**, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- O.C. Kaligis, **Deponeering Teori Dan Praktik**, P.T. Alumni, Bandung, 2011.
- Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum-Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Surachmman, Andi Hamzah, **Jaksa diberbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SKRIPSI

- Panji Wijnarko, **Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Acara Pidana**, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan) ,Depok, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2012.

Sartika Dwi Kusuma Wardhani, **Harmonisasi Asas Oportunitas Dengan Asas Legalitas dalam upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hak-Hak Korban**, Skripsi Program Ilmu Hukum (diterbitkan), Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2012.

Yelina Rachma P, **Tinjauan Tentang Pengaturan Asas Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Asas Oportunitas) Dalam KUHAP dan Relevansinya Dengan Asas Persamaan Kedudukan di Muka Hukum (*Equality Before The Law*)**, Skripsi Program Studi Ilmu (diterbitkan), Surakarta, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2010.

Kompas. *Indonesian Corruption Watch*.